



LAPORAN PELAKSANAAN PPID TAHUN 2025

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
KEMENTERIAN PERTANIAN

Daftar Isi

Sekilas PPID Unit Kerja	2
Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja	3
Maklumat Layanan.....	6
Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik	9
Anggaran Layanan Informasi Publik	10
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	10
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	11
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta alasan pengajuan keberatan	11
Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak dan Alasannya	12
Jumlah Pemohon berdasarkan Usia	12
Jumlah Pemohon berdasarkan Jenis Kelamin	12
Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan	13
Inovasi	14
Kolaborasi.....	15
Kendala dan Permasalahan	16
Penutup	16

Sekilas PPID Unit Kerja

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan bahwa informasi publik adalah hak setiap warga negara Indonesia. Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban badan publik menyediakan akses informasi cepat, mudah, dan akurat kepada masyarakat, yang dijamin oleh **UU Nomor 14 Tahun 2008**. Hal ini bertujuan menjamin hak warga negara mengetahui kebijakan, meningkatkan partisipasi, mendorong akuntabilitas, serta mencegah korupsi. Informasi yang wajib diberikan bersifat transparan, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat BPTU-HPT adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Direktur Pakan Ternak. BPTU-HPT mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. Sebagai salah satu badan public BPTU HPT Pelaihari berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi publik

Untuk menjamin terlaksananya keterbukaan informasi public pada Bulan Juni Tahun 2025, Kepala BPTU HPT Pelaihari menetapkan surat keputusan Nomor : 00134/Kpts/HM.130/F.2.I/06/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPTU-HPT Pelaihari. Surat tersebut mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPTU-HPT Pelaihari untuk menjalankan layanan informasi publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Anggota tim PPID berasal dari perwakilan bagian yang ada di BPTU HPT Pelaihari.

Pada tahun 2025 BPTU HPT Pelaihari meraih predikat UK/UPT Eselon 3 informatif. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja setelah sebelumnya mendapatkan predikat kurang informatif.

Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

1. Pengelolaan informasi public

PPID BPTU HPT Pelaihari telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Balai No B-11007/TI.120/F2.I/7/2025 yang memuat informasi setiap saat, informasi berkala dan informasi serta merta. Informasi internal dikumpulkan oleh PPID berdasarkan kategorinya untuk kemudian diperbarui melalui kanal yang telah tersedia yaitu website, media social, portal PPID dan media luring (brosur, poster, leaflet dan layar TV di ruang pelayanan).

2. Pengelolaan permohonan informasi public

Masyarakat dapat mengajukan permohonan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan prosedur yang sah. Permohonan layanan public dapat diakses secara langsung maupun daring. BPTU HPT Pelaihari menyediakan berbagai kanal pengajuan layanan public yaitu Portal PPID (www.ppid.pertanian.go.id/portal), WA center, media social (Facebook, Instagram, tiktok dan X) serta email (bptu.kdi@gmail.com).

3. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Pelaihari telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan Layanan Informasi Publik di website <http://bptuhptpelaihari.ditjenpkh.pertanian.go.id>, dengan menampilkan menu utama antara lain Profile Balai, informasi layanan penjualan dan layanan jasa, Informasi public dan peraturan.

Website PPID BPTU-HPT Pelaihari juga memberikan menu layanan utama “Informasi Publik” yang diklasifikasikan menjadi informasi yang wajib tersedia setiap, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.

Selain itu informasi public BPTU HPT Pelaihari juga dapat diakses di portal PPID Kementan dengan alamat <https://ppid.pertanian.go.id/portal>.

4. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik

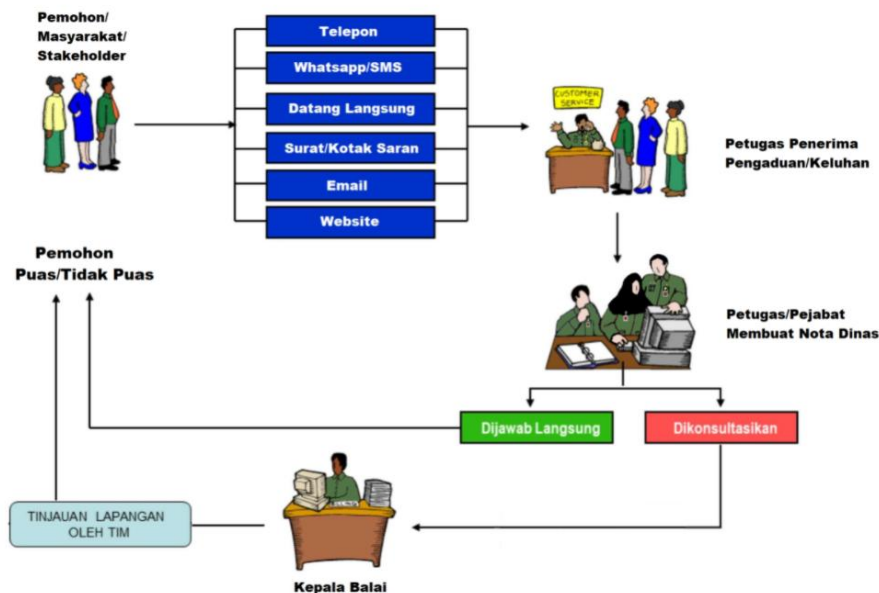
Kepala Balai, Katimker, Koordinator Fungsional melaksanakan penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik dan disaksikan seluruh pegawai. Penandatanganan ini menunjukkan komitmen seluruh Pimpinan dan pegawai untuk menjalankan keterbukaan informasi public di lingkup balai.



5. Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan

BPTU HPT Pelaihari menerima pengaduan Masyarakat melalui beberapa kanal yang telah disediakan (Telepon, whatsapp, email, kotak aduan, website, maupun secara langsung). Berikut ini adalah gambar prosedur terkait dengan pengaduan masyarakat/keluhan pelanggan

Mekanisme Pengaduan Masyarakat/Keluhan Pelanggan



6. Penderasan Informasi

Penderasan informasi adalah upaya untuk menyebarluaskan informasi terkait capaian kinerja, program, dan kegiatan yang dilakukan, serta keterbukaan informasi publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas.

BPTU HPT Pelaihari telah melakukan penyebaran informasi melalui postingan media social baik Instagram, Facebook, Tiktok, X dan Youtube. Sebanyak 111 konten orisinal yang merupakan kegiatan BPTU telah diposting di semua kanal media social.

Selain itu melalui semua kanal media social BPTU HPT Pelaihari telah melakukan repost dan share terhadap seluruh postingan akun PKH. Sehingga seluruh kegiatan Kementerian pertanian bisa dijangkau lebih banyak audien. Dengan upaya penderasan informasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman

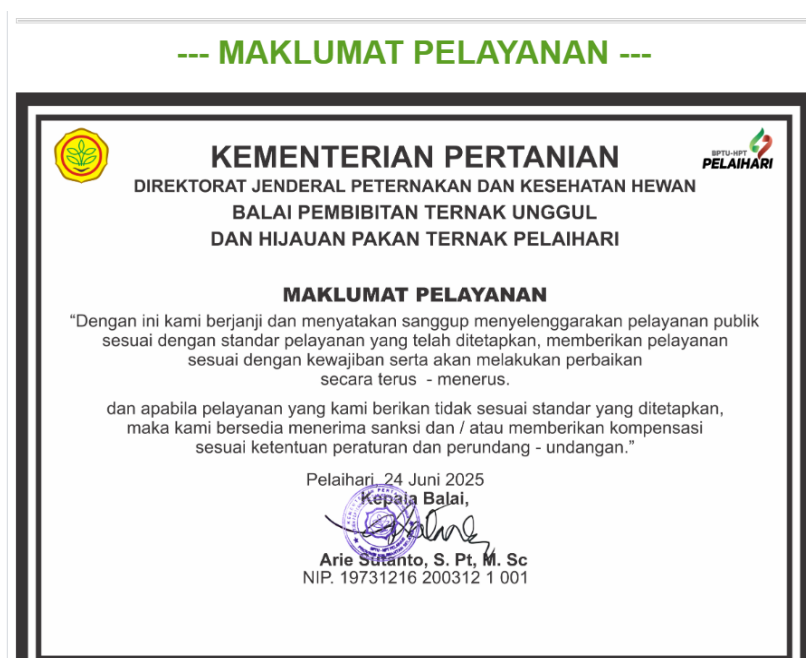
masyarakat tentang sektor pertanian, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pertanian

7. Studi tiru

BPTU HPT Pelaihari melakukan studi tiru ke BET Cipelang untuk meningkatkan pengetahuan akan keterbukaan informasi public. Studi tiru dilaksanakan pada bulan Juni 2025 dengan mengirimkan dua orang anggota tim PPID.

Maklumat Layanan

Maklumat layanan BPTU HPT Pelaihari telah ditetapkan dan diinformasikan melalui offline dan online.

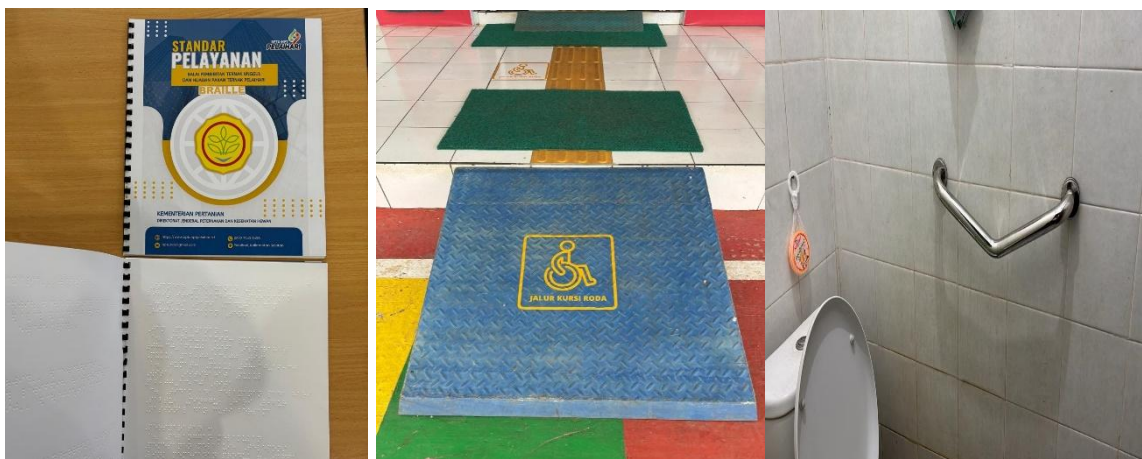


Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

BPTU-HPT Pelaihari menyediakan prasarana dan sarana pelayanan informasi yang memadai untuk mendukung kenyamanan pengguna layanan di BPTU HPT Pelaihari. Prasarana dan sarana tersebut meliputi :

1. Ruang Pelayanan
2. Fasilitas untuk kelompok rentan
3. Ruang konsultasi
4. Ruang arsip

Ruang pelayanan BPTU telah terintegrasi dengan menyatukan berbagai jenis layanan (informasi, jasa, penjualan dan pengaduan) dalam satu lokasi untuk efisiensi, transparansi, dan kecepatan. Tempat ini mempermudah pengguna mendapatkan layanan komprehensif tanpa perlu berpindah-pindah tempat, dan meningkatkan kepuasan public.



Rincian Sarana dan prasarana pelayanan informasi public dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Fasilitas Dalam Ruang Pelayanan dan Informasi

No	Fasilitas	Jumlah	Ket
1	Meja Pelayanan (unit)	3	
2	Kursi Pelayanan (unit)	2	
3	Sofa Panjang (unit)	1	
4	Sofa Pendek (unit)	1	
5	Meja Tamu (unit)	1	
6	Kusi Konsultasi (unit)	2	
7	Meja Konsultasi (unit)	1	
8	Komputer PC (unit)	2	
9	Laptop (unit)	1	
10	Printer berwarna (unit)	1	
11	Printer Pita (unit)	1	
12	TV LED 42" (unit)	2	
13	Scanner (unit)	1	
14	Brosur Holder (unit)	2	
15	HP (unit)	3	
16	Lemari Tempat charge HP (unit)	2	
17	Kotak Pengaduan (unit)	1	
18	Ruang Menyusui (unit)	1	
19	Kursi Roda (unit)	1	
20	Pegangan Kamar Mandi (unit)	2	
21	Tempat bermain anak (unit)	1	
22	Jalur Disabilitas	1	
23	SPP Huruf Braille	2	
24	Parkir prioritas	1	

Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Pada Bulan Juni Tahun 2024, Kepala BPTU HPT Pelaihari menetapkan surat keputusan Nomor : 00134/Kpts/HM.130/F.2.I/06/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPTU-HPT Pelaihari. Surat tersebut mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPTU-HPT Pelaihari untuk menjalankan layanan informasi publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTU-HPT Pelaihari terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun tugas dan tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU-HPT Pelaihari, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup UPT;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di UPT;
3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup UPT;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. Menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama



Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025 BPTU-HPT Pelaihari mengalokasikan anggaran untuk layanan informasi publik sebesar Rp 557.368.000 berupa belanja

1. Pelayanan Publik
2. Sarana promosi dan Publikasi
3. Perjalanan Promosi, Informasi, Pengurusan Pengiriman Ternak Itik dan Pameran,
4. Perjalanan Promosi Informasi dan Pengiriman Ternak Kambing
5. TV display.

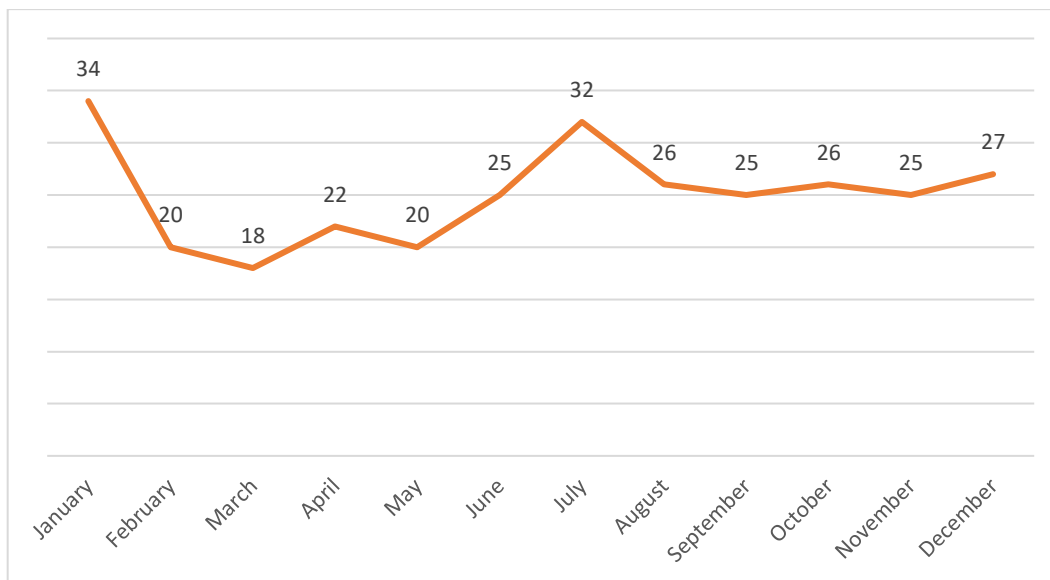
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Selama tahun 2025 BPTU HPT Pelaihari menerima 340 permohonan informasi public melalui email, whatsapp/telepon, portal PPID ataupun kunjungan langsung. Persentase paling banyak adalah permohonan informasi melalui whatsapp/telepon (88%), kemudian kunjungan langsung (8,8%), portal PPID 2,3% dan email (0,58%). Permohonan informasi melalui portal PPID perbulan dapat dilihat pada grafik 1.

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

No	Media Permohonan Informasi Publik	Jumlah Permohonan	Persentase
1	Email	2	0,58%
2	Whatsapp/Telepon	300	88,2%
3	Portal PPID	8	2,3%
4	Kunjungan Langsung	30	8,8%
Jumlah		340	100%

Grafik 1. Permohonan Informasi Melalui Whatsapp/Telepon



Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi public tercepat adalah 10 menit, sedang terlama adalah 3 (tiga) hari. Rata – rata waktu pelayanan informasi public adalah 30 menit.

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Tidak ada pengajuan keberatan

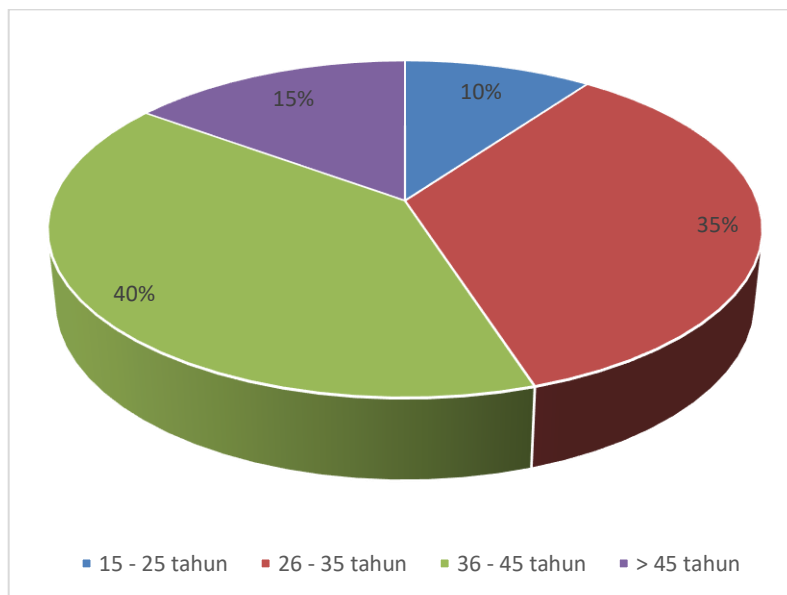
Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak dan Alasannya

Tidak ada permohonan yang ditolak

Jumlah Pemohon berdasarkan Usia

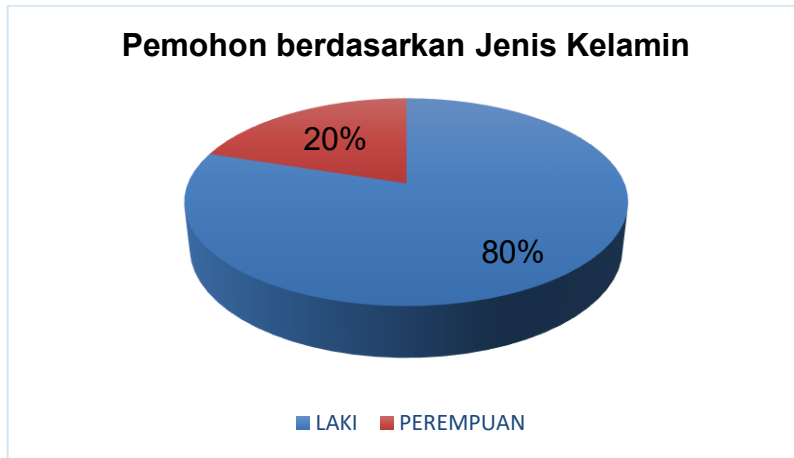
15 - 25 tahun	34	orang
26 - 35 tahun	119	orang
36 - 45 tahun	136	orang
> 45 tahun	51	orang

Grafik 2. Pemohon berdasarkan Usia



Jumlah Pemohon berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 3. Pemohon berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah pemohon laki – laki : 272 orang

Jumlah pemohon Perempuan : 68 orang

Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan

Mayoritas permohonan informasi public adalah mengenai stok ternak, prosedur pembelian dan prosedur magang/eduwisata/kunjungan/penelitian. Selain itu ada permohonan informasi SOP pemeliharaan tenak, pakan dan kesehatan ternak. Selain itu ada permohonan informasi mengenai kepegawaian dan pengadaan barang dan jasa.

Tabel 3. Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan

No	Kategori	Jumlah Permohonan	Persentase
1	Pertanian	100	29,4
2	Anggaran Keuangan	-	-
3	Kepegawaian	1	0,3
4	Hukum dan Perundang undangan	1	0,3
5	Pengadaan barang dan jasa	2	0,6
6	Lainnya	236	69,4

Inovasi

Aplikasi Almo

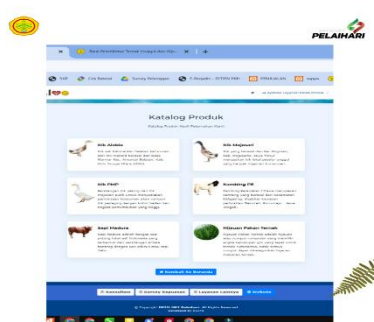
BPTU HPT Pelaihari menyediakan aplikasi Almo yang merupakan layanan terintegrasi untuk mengakses pemesanan produk/jasa, katalog produk, harga terkini, konsultasi online, pengaduan dan pengisian SKM.

Aplikasi Layanan Mode Online Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kementerian Pertanian dikembangkan sebagai upaya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Instansi Pemerintahan

Aplikasi dimaksudkan untuk memberi pelayanan yang lebih mudah, murah, terpadu dan cepat. ALMO merupakan aplikasi terpadu dimana pelanggan bisa mengakses layanan public BPTU HPT Pelaihari..



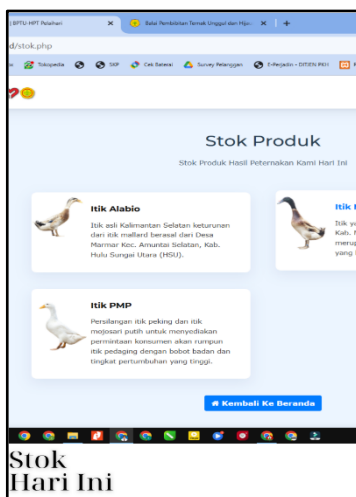
Pemesanan Produk



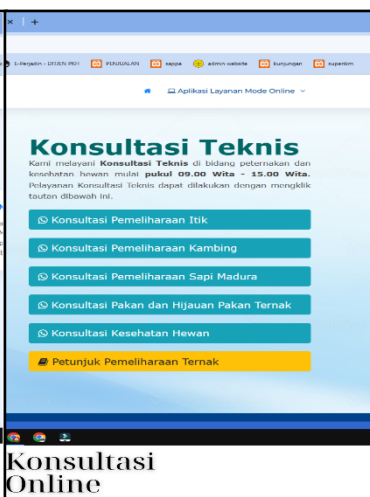
Katalog Produk



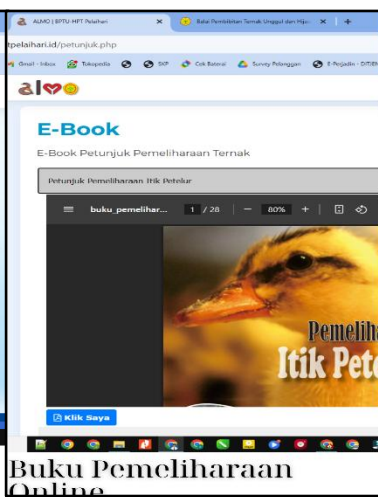
Harga Terkini



Stok Hari Ini



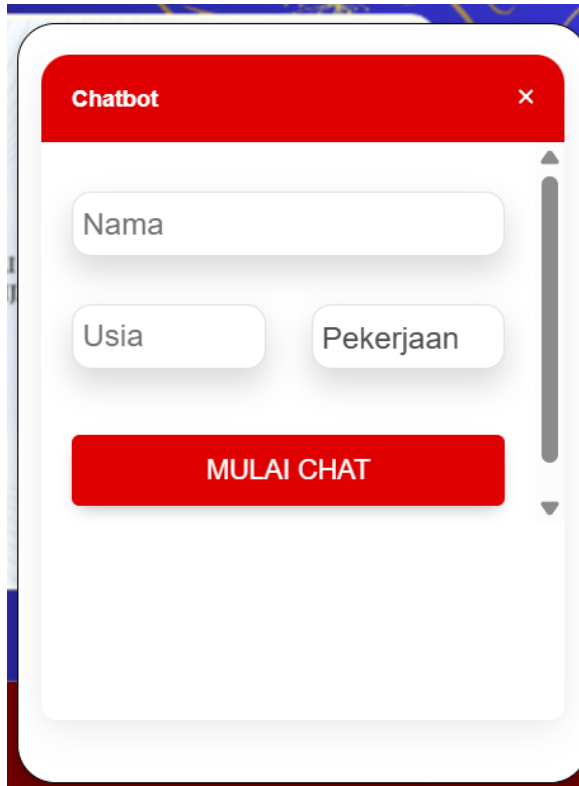
Konsultasi Online



Buku Pemeliharaan Online

Chat Bot

Chat bot dapat diakses di website dan dapat menjawab segera pertanyaan yang umum tentang balai.

A screenshot of a chatbot interface. At the top is a red header bar with the text "Chatbot" and a close button (X). Below the header are three input fields: "Nama" (Name), "Usia" (Age), and "Pekerjaan" (Occupation). Below these fields is a red button with the text "MULAI CHAT". The interface is set against a white background with a subtle shadow.

Kolaborasi

1. Kolaborasi dengan peternak
 - MoU dengan Mato Aie Jaya Farm
 - MoU dengan Rusdiansyah (Peternak)
 - MoU dengan Saini (Peternak)

2. Kolaborasi Dengan Perguruan Tinggi

Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat Kerjasama di bidang pengembangan SDM, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan bisnis peternakan telah dilakukan dengan

- Universitas Sari Mulia
- Universitas Lambungmangkurat
- Universitas Brawijaya

3. Kolaborasi Dengan Dinas, Media Massa Dan Instansi Terkait

- Forum Konsultasi Publik
- Radio Tuntung Pandang dalam program inspirasi pagi
- TVRI Kalsel untuk program banua bicara “memilih bibit ternak berkualitas”
- Radar Banjarmasin untuk peliputan acara bulan bakti peternakan

Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah terkait SDM, dengan jumlah SDM yang menguasai website masih terbatas.

Penutup

Demikian laporan PPID tahun 2025 ini disusun, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public di BPTU HPT Pelaihari.

Pelaihari, Januari 2026

Kepala Balai



Arie Sutanto, S.Pt, M.Sc
Nip. 197312162003121001